

IMPLEMENTASI BUDAYA DEMOKRASI DI PESANTREN MIFTAHUL 'ULUM DESA BANTARBARANG, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN PURBALINGGA

Zulfikar Abdulah Iman Haqiqi

Madin Al Mubarakah RT 01 RW 01 Desa Gunungwuled, Rembang, Purbalingga
zulfikarabdulah44@gmail.com

Abstract

Against this background, there is a wrong understanding of the culture of democracy by the younger generation, causing democratic freedom to go too far. From this, it can cause the loss of the identity of the nation's children so that they are far from democratic values. On the other hand, Islamic boarding schools are non-formal educational institutions that are religion-based and in practice aim to study, understand, and practice Islamic teachings. Islamic boarding schools are also part of Indonesia's socio-cultural heritage. Where socio-culture is the basic or initial foothold of Pancasila. Miftahul 'Ulum Bantarbarang Islamic Boarding School as a salaf Islamic boarding school also provides guidance on democratic values among its students. This research uses descriptive analytical method and belongs to qualitative research. The data in this study were taken by means of observation, interviews and documentation studies. The results of this study include that non-formal educational institutions such as superior Islamic boarding schools are used as laboratories for democracy, because within the Islamic boarding school environment the focus is on developing the potential of students. So that the merging of democratic democratic values can be carried out easily and in the end will give birth to a democratic society. As for the implementation of the democratic culture that is preserved at the Miftahul 'Ulum Islamic Boarding School, namely, there are activities based on deliberations, discussions, and general elections in electing the chairman of the pesantren. In addition, within the scope of the pesantren and the surrounding community, one of the reflected democratic cultural values is the value of kinship, mutual help, and so on.

Keywords: Implementation, Democracy, Islamic Boarding School, Miftahul 'Ulum

Abstrak

Dilatarbelakangi adanya pemahaman yang salah terhadap budaya demokrasi oleh generasi muda, mengakibatkan kebebasan berdemokrasi menjadi keblabasan. Dari hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya jati diri anak bangsa sehingga jauh dari nilai-nilai demokrasi. Di sisi lain, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan nonformal yang berbasis agama dan dalam praktiknya bertujuan untuk mempelajari, memahami, serta mengamalkan ajaran Islam. Pondok pesantren juga menjadi bagian dari sosio budaya bangsa Indonesia. Di mana sosio budaya merupakan dasar atau pijakan awal dari adanya Pancasila. Pesantren Miftahul 'Ulum Bantarbarang sebagai pesantren salaf juga memberikan penanaman nilai-nilai demokrasi dikalangan para santrinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan tergolong ke dalam penelitian kualitatif. Adapun data dalam penelitian ini diambil dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini diantaranya yaitu lembaga pendidikan nonformal seperti pondok pesantren hendaknya dijadikan sebagai laboratorium demokrasi, karena dalam lingkungan pesantren berfokus pada pengembangan potensi santri. Sehingga penanaman nilai-nilai budaya demokrasi dapat dilakukan dengan mudah dan pada akhirnya akan melahirkan masyarakat demokratis. Adapun

Implementasi Budaya Demokrasi di Pesantren . . .

Zulfikar Abdulah Iman Haqiqi

pengimplementasian budaya demokrasi yang dilestarikan di Pondok Pesantren Miftahul ‘Ulum yakni diantaranya terdapat kegiatan-kegiatan yang berbasis musyawarah, diskusi, dan pemilihan umum dalam memilih ketua yang ada di pesantren. Selain itu, dalam lingkup antara pesantren dengan masyarakat sekitar, nilai-nilai budaya demokrasi yang tercerminkan salah satunya yakni nilai kekeluargaan, tolong menolong, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Implementasi, Demokrasi, Pesantren, Miftahul ‘Ulum

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia. Dengan banyaknya populasi tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara yang majemuk. Hal tersebut dibuktikan dengan beragamnya etnis, suku, agama, budaya, dan adat-istiadat yang terdapat di dalamnya. Tentunya dengan kemajemukan dan keberagaman yang dimiliki Indonesia, menjadi tantangan tersendiri dalam hal menjaga serta memberdayakan kemajemukan tersebut. Dalam merealisasikan upaya tersebut, peran serta dari generasi muda tidak dapat terlepas, tak terkecuali generasi muda dari kalangan santri. Mengingat bahwa populasi penduduk Indonesia yang didominasi oleh masyarakat muslim, keterlibatan pemuda-pemuda dari kalangan santri dalam hal menanamkan nilai-nilai demokrasi di pesantren banyak memberikan pengaruh yang besar bagi keseimbangan negara.

Kyai merupakan tokoh yang memiliki peranan paling strategis dan mempunyai kendali kuat dalam penyelenggaraan pendidikan serta menentukan kebijakan atau arah gerak di pesantren. Pesantren juga merupakan lembaga yang berfokus pada proses pengembangan potensi santri yang notabennya juga merupakan warga negara. Lantaran lingkungan pesantren memiliki cara tersendiri dalam mengelola pemberdayaan kemajemukan yang ada. Maka semestinya lembaga pendidikan pesantren menjadi wadah atau laboratorium demokrasi yang strategis dalam menerapkan dan melestarikan pendidikan demokrasi (Supangat & Halimi, 2017).

Generasi muda khususnya dari kalangan santri merupakan penerus cita-cita bangsa yang akan menjadi tokoh utama atau sumber insan bagi pembangunan nasional. Melalui pendidikan demokrasi lah yang akan menghasilkan masyarakat demokratis, sehingga masyarakat demokratis memiliki kesadaran dan juga keyakinan bahwa mereka dapat memaksimalkan kebebasan serta kesejahteraan dengan baik dan benar. Selaras dengan tulisan (Supangat & Halimi, 2017) yang mengutip pada (Zamroni, 2011: 39) bahwa pendidikan harus menjadi media dalam melahirkan masyarakat-masyarakat yang demokratis. Tanpa adanya kesadaran dan

kepahaman terhadap nilai-nilai demokrasi, maka menjadi masyarakat demokratis hanyalah seperti angan-angan saja. Kesadaran akan ide dan cita-cita demokrasi yakni hanya dengan masyarakat demokratis lah yang bisa memaksimalkan kebebasan dan kesejahteraan, akan menjadi pondasi kuat dalam membangun kehidupan masyarakat yang demokratis.

Demokrasi sebagai paham kebebasan yang mendunia, dalam praktiknya telah merambah ke berbagai jenis lapisan kehidupan masyarakat. Namun istilah demokrasi sendiri tidak cukup banyak dipahami secara baik dan benar. Dalam artian, masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman akan demokrasi itu sendiri, selain itu juga adanya perbedaan pandangan atau perspektif yang mendasar tentang demokrasi dalam pengimplementasiannya, menjadikan demokrasi sering disalah artikan. Berdasarkan problem tersebut, maka perlu adanya sebuah kedewasaan dalam memahami serta mengimplementasikan dari nilai-nilai budaya demokrasi. Karena dengan ketidak dewasaan dan ketidak memahaminya masyarakat dalam pengimplementasian demokrasi merupakan sebab dari kurang berhasilnya penanaman nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan (Sundawa, 2011).

Demokrasi juga bergantung pada yang namanya proses. Di mana proses yang cermat dan teliti merupakan hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran demokrasi. Hal tersebut tentunya akan membawa pada terwujudnya demokrasi yang asli (*genuine*). Menurut (Darmawan, 2015: 96-97) dijelaskan bahwa demokrasi merupakan sebuah proses yang didalam prosesnya bukanlah milik dari penguasa namun proses tersebut milik rakyat, karena rakyat merupakan esensi dari kehidupan demokrasi itu sendiri. Selain itu, dijelaskan juga bahwasannya demokrasi bergantung pada ideologi suatu bangsa, maka upaya demokratisasi dianggap sebagai pembelajaran demokrasi yang berorientasi kepada ideologi bangsa, yakni Pancasila.

Proses demokratisasi atau yang sering disebut dengan pembudayaan demokrasi dapat dipahami bahwa dalam prosesnya dibutuhkan media sebagai pendukung bagi proses tersebut. Dalam pembudayaan demokrasi, media sangat berperan penting khususnya bagi seorang pendidik. Nilai-nilai demokrasi dan *civic disposition* tidak dapat dipisahkan karena sangat berkaitan erat. Dalam (Winataputra & Budimansyah, 2012) dijelaskan bahwa *civic disposition* sendiri merupakan kepribadian yang mencakup kesopanan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keragaman,

kesabaran dan keajegan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetian terhadap bangsa dan segala prinsipnya.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan nonformal dengan basis agama diharapkan adanya kontribusi dalam menumbuhkan dan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Karena pondok pesantren sendiri menjadi simbol pendidikan Islam yang menjadi tuntunan pendidikan di masyarakat dalam perubahan sosial dan edukasi (Srijatun, 2016). Sehingga pemahaman nilai-nilai demokrasi kepada santri melalui pengembangan *civic disposition* santri, mampu menghadapi realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pengimplementasian nilai-nilai demokrasi ini dilakukan bertujuan guna membina santri agar mereka tidak melupakan akar budaya demokrasi yang seutuhnya ketika mereka berhadapan dengan realitas sosial budaya di era globalisasi (Supangat & Halimi, 2017).

B. Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis sendiri bertujuan untuk memudahkan penelitian dalam hal menganalisis, mengkaji, dan mengungkapkan informasi argumentatif serta teoritik terkait implementasi demokrasi di Pesantren Miftahul ‘Ulum Bantarbarang secara lebih mendalam. Metode deskriptif sendiri merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau sesuatu pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini sendiri ialah untuk membuat deskripsi akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi (Sukmadinata, 2006).

Adapun data penelitian diperoleh melalui observasi, studi dokumentasi, studi lapangan, dan juga wawancara. Analisis data kualitatif selama dilapangan menggunakan model Miles dan Huberman. Dalam (Sugiyono, 2012) dijelaskan bahwa data tersebut terdiri atas tiga aktivitas, yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Adapun teknik analisis data yang diterapkan antara lain Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Triangulasi, dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pembudayaan Demokrasi di Pesantren Miftahul ‘Ulum Bantarbarang

Seperti dalam (Muthohar, 2007) bahwasannya pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan nonformal yang berbasis keagamaan dan dalam pelaksanaannya menggunakan

sistem yang terstruktur. Sistem tersebut terdiri dari nilai, tujuan, dan fungsi yang bekerja secara terpadu dan tidak terpisahkan antara satu sama lain.

Kajian ini mengangkat Pondok Pesantren Miftahul ‘Ulum Bantarbarang. Pesantren yang didirikan oleh K.H. Mushonif pada tanggal 4 Oktober 1996 tersebut merupakan salah satu pesantren salaf yang mashyur di Kabupaten Purbalingga. Sebelum menjadi pondok pesantren, dahulu hanya merupakan sebuah pengajian kecil milik keluarga Sangroni yang lokasinya berada di tengah-tengah desa Bantarbarang. Namun seiring berjalannya waktu, banyak anak-anak yang ingin menuntut ilmu dengan keluarga Sangroni sehingga ia memikirkan bagaimana cara agar anak-anak tersebut dapat menuntut ilmu dengan sarana-prasarana yang memenuhi.

Kiyai Mushonif dengan bantuan serta dukungan dari masyarakat sekitar akhirnya membangun pondok pesantren, tepatnya pada tahun 1994. Bangunan mulai berdiri sedikit demi sedikit dengan bantuan masyarakat, kemudian pondok tersebut dinamakan dengan Pondok Pesantren Miftahul ‘Ulum Bantarbarang. Pembangunan pesantren selesai pada tanggal 4 Oktober 1996 yang bertempat di Desa Bantarbarang RT 01/05 Dusun II, Rembang, Purbalingga. Kemudian mendapatkan surat izin operasional pondok pesantren pada tahun 2000 (Makhfud, 2022).

Dengan letak geografis pondok pesantren yang berada di lereng pegunungan dan berada di ujung desa menjadikan pesantren Miftahul ‘Ulum berada di lokasi yang sangat strategis untuk menuntut ilmu. Suasana yang masih asri dan rindang dengan banyaknya tumbuh-tumbuhan memungkinkan santri-santri lebih konsentrasi dalam menuntut ilmu. Demikian juga dalam hal ibadah, suasana di pondok pesantren tersebut menjadikan nuansa hati yang khusus’ guna mendekatkan santri-santri kepada Allah SWT.

Sistem pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum lebih ke arah kolaborasi atau penggabungan antara kurikulum Kemenag dengan kurikulum Madrasah (mengadopsi sistem pembelajaran dinihan ketika Kiai Mushonif masih nyantri di Pondok Pesantren Girikusuma). Sampai sekarang sistem pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum tidak terpacu pada satu sistem pendidikan yang istilahnya modern saja tetapi memang mencampur antara sistem modern dengan sistem salaf (Makhfud, 2022).

Dari hal tersebut, sehingga dalam praktik pembelajarannya tidak hanya diajarkan kitab-kitab salaf atau kitab-kitab yang berbasis *akhrawi*, namun diajarkan pula ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti ilmu akidah akhlak, fiqh, sejarah kebudayaan islam, muamalah, dan

lain sebagainya. Tak terkecuali dengan pembelajaran nilai-nilai demokrasi. Pembudayaan demokrasi yang ada di Pondok Pesantren Miftahul ‘Ulum dilakukan baik dalam pesantren maupun dalam hubungan luar pesantren dengan masyarakat sekitar.

Pengimplementasian budaya demokrasi yang dilestarikan dalam Pondok Pesantren Miftahul ‘Ulum diantaranya tercermin dari budaya musyawarah. Baik musyawarah antara santri dengan santri, santri dengan pengurus, pengurus dengan pengasuh, maupun pengasuh dengan wali santri atau masyarakat sekitar. Selain itu, budaya pemilihan lurah yang dilaksanakan dengan pemungutan suara juga mencerminkan budaya demokrasi. Tidak hanya dalam pemilihan ketua lurah pondok, pemilihan yang lain seperti pemilihan ketua angkatan santri, pemilihan ketua madrasah juga merupakan rangkaian bukti bahwa telah dilestarikannya budaya demokrasi dalam keseharian di Pondok Pesantren Miftahul ‘Ulum.

Selanjutnya, implementasi budaya demokrasi yang ada di Pondok Pesantren Miftahul ‘Ulum juga didukung dengan adanya beberapa organisasi dalam pesantren yang menunjang dalam pembelajaran demokrasi. Misalnya organisasi kepengurusan pesantren, organisasi hadroh atau rebana, organisasi haflah, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya organisasi tersebut di pesantren, akan lebih mudah dalam penanaman nilai-nilai budaya demokrasi yang ada.

Di sisi lain, dalam hal pengimplementasian budaya demokrasi di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul ‘Ulum Bantarbarang dilakukan dengan cara mengaplikasikan nilai-nilai budaya yang islami. Dimana budaya yang mengandung nilai-nilai keislaman dipadukan dengan kondisi masyarakat sekitar pesantren. Sehingga nilai-nilai yang lahir di Pesantren Miftahul ‘Ulum akan mencerminkan nilai-nilai budaya demokrasi, seperti halnya budaya disiplin, budaya kekeluargaan, budaya teratur, budaya bersih ,dan budaya hormat menghormati antara warga pesantren.

Sikap hormat menghormati yang telah mengkar pada budaya pesantren bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan santri, jamaah, dan masyarakat sekitar pesantren. Dari segi pelaksanaan program pesantren, pesantren selalu mengikut sertakan masyarakat sekitar, yakni dengan tidak didominasi oleh pengurus pesantren saja namun dengan masyarakat sekitar juga. Sehingga hal ini menciptakan budaya kekeluargaan yang ditumbuhkan oleh pesantren. Karena dari proses pendidikan demokrasi dapat menghasilkan masyarakat yang demokratis, yang kemudian memiliki kesadaran serta keyakinan bahwa

masyarakat demokratis dapat memaksimalkan kebebasan dan kesejahteraan secara baik dan benar.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Zamroni, (2011: 39) bahwasannya pendidikan harus menjadi media dalam melahirkan masyarakat-masyarakat yang demokratis. Tanpa adanya kesadaran dan kepaahaman terhadap nilai-nilai demokrasi, maka menjadi masyarakat demokratis hanyalah seperti angan-angan saja. Kesadaran akan ide dan cita-cita demokrasi yakni hanya dengan masyarakat demokratis lah yang bisa memaksimalkan kebebasan dan kesejahteraan, akan menjadi pondasi kuat dalam membangun kehidupan masyarakat yang demokratis.

2. Nilai-Nilai Budaya Demokrasi yang dikembangkan di Pesantren Miftahul ‘Ulum Bantarbarang

Nilai-nilai budaya demokrasi yang dikembangkan atau dilestarikan di Pesantren Miftahul ‘Ulum Bantarbarang diantaranya ialah budaya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti halnya budaya disiplin, budaya menjaga kekeluargaan dan kebersamaan, serta budaya menghormati orang lain. Di mana dalam hal perealisasi program pesantren, pesantren selalu berupaya untuk mengikutsertakan masyarakat sekitar. Artinya bahwa pesantren tidak berjalan sendiri dan tidak mendominasi dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga dari situlah terciptanya budaya sopan santun, budaya kekeluargaan, budaya menghargai serta menghormati yang diajarkan dalam pesantren. Ditambah lagi bahwa nilai-nilai demokrasi tersebut tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren secara damai tanpa adanya pemaksaan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, nilai budaya demokrasi yang dikembangkan di Pondok Pesantren Miftahul ‘Ulum Bantarbarang yakni nilai kebebasan mengemukakan pendapat, kesamaan dalam kesempatan, dan kemandirian. Di Pondok Pesantren Miftahul ‘Ulum banyak kegiatan-kegiatan yang berbasis diskusi maupun musyawarah. Artinya pihak pesantren selalu terbuka akan pendapat-pendapat dari para santri. Tidak pernah membatasi dalam hak bersuara itu tandanya bahwa pihak pesantren juga selalu memberikan ruang kesamaan dalam berbagai kesempatan bagi setiap santri. Kemandirian pun menjadi nilai budaya demokrasi yang dikembangkan dalam pondok pesantren ini, di mana para santri selalu dituntut untuk bisa mandiri dalam mengerjakan berbagai kegiatan.

Adapun nilai-nilai budaya demokrasi yang diimplementasikan di Pesantren Miftahul ‘Ulum Bantarbarang yakni dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilihan lurah pondok,

pemilihan ketua angkatan santri, adanya kelompok-kelompok diskusi, adanya kegiatan *batsuma tsail* (musyawarah diskusi), pertemuan atau musyawarah antara santri dengan pembina santri, serta adanya hubungan yang harmonis antara pengasuh pesantren dengan para santri.

Tentunya dari beberapa nilai-nilai budaya yang dikembangkan di Pondok Pesantren Miftahul ‘Ulum tidak lain bertujuan untuk mendidik para santri agar mempunyai jiwa kemenangan. Pengimplementasian nilai-nilai demokrasi akan bermanfaat bagi para generasi muda dalam menghadapi era globalisasi ini. Di sisi lain, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Oleh karena itu, perlu adanya sumbangsih atau turut andil dalam memajukan pembangunan sumber daya manusia yang handal. Sehingga kemudian dari sumber daya manusia yang dihasilkan oleh pesantren tersebut akan menjadi sumber daya yang mampu memberikan warna tersendiri di tengah-tengah masyarakat.

Selaras dengan (Mastuhu, 2007) yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan pesantren yakni menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim. Dalam artian kepribadian muslim yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat dan berkhidmat kepada masyarakat, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama dan menegakkan Islam dan kejayaan umat, mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia (Supangat & Halimi, 2017).

D. Simpulan

Lembaga pendidikan nonformal seperti pondok pesantren hendaknya dijadikan sebagai laboratorium demokrasi, karena dalam lingkungan pesantren berfokus pada pengembangan potensi santri. Sehingga penanaman nilai-nilai budaya demokrasi dapat dilakukan dengan mudah dan pada akhirnya akan melahirkan masyarakat demokratis. Pondok Pesantren Miftahul ‘Ulum sebagai salah satu pesantren salaf yang ada di Bantarbarang telah melestarikan atau mengimplementasikan budaya demokrasi dalam pesantren.

Adapun pengimplementasian budaya demokrasi yang dilestarikan di Pondok Pesantren Miftahul ‘Ulum yakni diantaranya terdapat kegiatan-kegiatan yang berbasis musyawarah, diskusi, dan pemilihan umum serta adanya beberapa organisasi di pesantren yang dapat menunjang terkait pembelajaran demokrasi. Selain itu, dalam lingkup antara pesantren dengan masyarakat sekitar, nilai-nilai budaya demokrasi yang tercerminkan salah satunya yakni nilai

kekeluargaan, tolong menolong, kebebasan mengemukakan pendapat, kesamaan dalam segala kesempatan, kemandirian, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Darmawan, C. (2015). Demokrasi dalam Persimpangan Makna. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik dalam Memperkokoh Jati Diri PKN* (hlm. 96–97).
- Makhfud, M. S. (2022). *Sejarah Pondok Pesantren Miftahul 'Ulum dan Perannya Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Desa Bantarbarang, Kec. Rembang, Kab. Purbalingga (1996-2017)* [Skripsi]. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Mastuhu, M. (2007). *Sistem Pendidikan Nasional Visioner*. Lentera Hati.
- Muthohar, A. (2007). *Ideologi Pendidikan Pesantren*. Pustaka Rizki Putra.
- Srijatun. (2016). Implementasi Model Pendidikan Pondok Pesantren Di Panti Asuhan Puteri Aisyiyah Slawi Kabupaten Tegal. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol, 10. No, 1.
- Sugiyono, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Graha Aksara.
- Sundawa, D. (2011). *Membangun Kecerdasan Berdemokrasi Warga Negara Muda Melalui Perwujudan Kelas Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Laboratorium Demokrasi* [Disertasi Doktor]. UPI Bandung.
- Supangat, & Halimi, M. (2017). Pembudayaan Demokrasi di Pesantren dalam Mengembangkan Civis Disposition Santri. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol, 2. No, 1, 75–80.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional, Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran*. Widya Aksara Press.
- Zamroni. (2011). *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Gavin Kalam Utama.